

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Dasar Penelitian**

Salah satu masalah yang Jakarta hadapi sebagai Ibukota Indonesia adalah kelebihan penduduk. Menurut Susan Blackburn pada buku Sejarah Jakarta 400 Tahun, Jakarta merupakan salah satu kota dengan tingkat pertumbuhan penduduk paling pesat di Indonesia. Angka resmi memperlihatkan bahwa berlipat gandanya populasi dari 823.000 jiwa pada tahun 1948 menjadi 1.782.000 jiwa pada 1952, lalu stabil pada pertengahan 1950-an, kemudian meningkat lagi sebanyak 3.813.000 jiwa pada tahun 1965.

Bertambahnya penduduk dalam suatu kota berbanding lurus dengan bertambahnya permasalahan perkotaan. Kelebihan penduduk menyebabkan masalah baru seperti kelebihan sampah yang tidak terkelola dengan baik yang akan mengakibatkan banjir. Tidak hanya itu, rata-rata penduduk baru penghuni Jakarta merupakan warga hasil urbanisasi dengan tingkat ekonomi yang rendah sehingga sebagian besar dari mereka tidak memiliki tempat tinggal yang tetap.

Didasari hal ini, banyak sekali upaya-upaya pemerintah pusat lakukan untuk membenahi Jakarta. Upaya ini sudah dilakukan semenjak Indonesia merdeka, salah satunya adalah perubahan status administrasi Kota Jakarta pada tahun 1959 menjadi kota administrasi tingkat satu. Selanjutnya, di tahun yang sama, status Kota Jakarta mengalami perubahan dari sebuah kotapraja di bawah

wali kota ditingkatkan menjadi daerah tingkat satu (Dati I). Dikarenakan perubahan status ini, mengakibatkan perubahan instrumen yang tadinya dipimpin oleh wali kota menjadi gubernur yang pada masa kolonial diangkat oleh pemerintah pusat. (Blackburn, 1989, p. 230)

Selain alasan historis dan administrasi, perubahan status Kota Jakarta pada akhir tahun 1950-an menjadi Dati I juga didasari dengan alasan agar bisa lebih terfokus dalam menyelesaikan masalah yang ada. Seperti yang kita ketahui bahwa memimpin Kota Jakarta tentu bukan suatu hal yang mudah. Dilihat dari segi masyarakatnya, masyarakat Jakarta merupakan masyarakat yang multikultural dikarenakan terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Tentu tidak mudah dalam mengatur masyarakat yang memiliki adat-istiadat serta kebiasaan yang berbeda.

Sejarah mencatat, sebelum Kota Jakarta berubah status menjadi Dati I, ada 3 pemimpin yang pernah menduduki kursi Wali Kota Jakarta. Sebut saja Suwiryo, Sjamsuridjal dan Sudiro. 3 Pemimpin Jakarta ini ditantang melawan bayang-bayang kolonialisme yang masih melekat dengan erat dalam sudut-sudut Kota Jakarta untuk menciptakan Jakarta wajah baru. Seperti yang kita pahami, identitas sebagai bangsa yang merdeka tidak semata-mata diraih dengan deklarasi kemerdekaan. Aspek budaya, sosial, ekonomi, politik dan semua aspek kehidupan bermasyarakat masih banyak yang terintervensi oleh warisan kolonialisme. (Zed, 2017)

Tiga pemimpin ini bahu membahu membangun Kota Jakarta. Suwiryo

sebagai wali kota pertama, memfokuskan Kota Jakarta dengan unsur nasionalisme yang kuat. Hal ini Suwiryo wujudkan dikarenakan situasi Indonesia masih dalam suasana pasca kemerdekaan. Suwiryo melakukan nasionalisme pemerintahan dan kekuasaan kota. Selanjutnya, estafet kekuasaan itu dilanjutkan oleh Samsuridjal. Pemimpin yang pernah menjabat menjadi Wali Kota Surakarta ini membangun stadion nasional IKADA (Ikatan Atletik Djakarta) yang dimulai pada 18 Juli 1950 untuk keperluan Pekan Olahraga Nasional ke-2 (PON II) yang dilaksanakan pada Oktober 1951. Samsuridjal juga fokus memberi prioritas pada masalah air minum, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebijakan atas tanah.

Kursi wali kota terakhir sebelum berganti menjadi Gubernur diduduki oleh Sudiro. Meskipun banyak tantangan dikarenakan Kota Jakarta merupakan tempat utama akan konflik kebijakan antara kebijakan kota dan kebijakan nasional. Pada masa jabatannya, dia menyatakan bahwa ada 3 daerah teritoris utama di Jakarta: Bandara Kemayoran (Mewakili Jakarta Pusat), Pelabuhan Tanjung Priok (Mewakili Jakarta Utara) dan kota satelit Kebayoran Baru (Mewakili Jakarta Selatan). Pada 1957, Sudiro membuat kebijakan sekolah gratis untuk tingkat sekolah dasar (SD), namun kebijakan ini hanya berlaku 1 tahun karena pemerintah pusat membatalkan kebijakan ini.

Akan tetapi, meskipun kebijakan para wali kota ini sudah semaksimal mungkin diarahkan untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat Jakarta, tidak jarang banyak kritik bermunculan. Wali Kota Jakarta dianggap hanya menjadi

pemimpin bayangan karena kebijakan seutuhnya dilaksanakan oleh Soekarno. Kritik-kritik banyak dilakukan melalui media masa seperti koran pada tahun tersebut. Padahal, wali kota merupakan salah satu ‘aktor politik’ yang memiliki peran penting dalam pembangunan wilayah perkotaan. Peneliti menilai bahwa wali kota merupakan bagian dari pemerintah yang memiliki fungsi dan wewenang mengelola kota dan membuat kebijakan sebagai pelayan publik serta wali kota memiliki jangkauan yang ‘lebih dekat’ dengan penduduk dibandingkan pemerintahan pusat.

Tetapi, pada kondisi saat itu Soekarno memiliki andil yang lebih untuk membangun Kota Jakarta. Hal ini dikarenakan regulasi dan kebijakan yang berporos pada pemerintah pusat. Soekarno mengaktualisasikan Jakarta wajah baru dengan pembuatan *Outline Plan*. *Outline Plan* ini dibuat ketika Kotapraja Jakarta di bawah kepemimpinan Wali kota Sudiro (1953-1959). Soekarno dan Sudiro merumuskan pembangunan Jakarta dalam empat hal terpenting yaitu wisma (rumah), karya (lapangan kerja), marga (transportasi) dan suka yang mencakup rekreasi dan fasilitas umum. (Farabih, 2005, p. 3)

Soekarno seolah memproklamirkan bahwa Jakarta dapat menjadi kota yang terbebas dari belenggu kolonialisme. Cara Soekarno untuk terlepas dari belenggu kolonialisme ini adalah dengan cara aktualisasi diri yang diwujudkan dalam pembangunan empat infrastruktur. Aktualisasi diri ini bertujuan untuk membuktikan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan memiliki identitas baru. Soekarno jatuh cinta dengan romantika revolusi yang ia anggap memiliki

tujuan untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritual bangsa Indonesia.

Sayangnya, pada awal tahun 1950-an, kebijakan Soekarno hanya terfokus untuk mempercantik Kota Jakarta, tetapi tidak untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kependudukan yang ada. Cita-cita Soekarno tampaknya sangat utopis dan jauh dari kata tercapai. Jakarta hanya kuat dalam hal retorika dan simbol namun lemah dalam tindakan revolusioner yang nyata. (Blackburn, 1989, p. 272). Hal ini juga dilatarbelakangi dengan situasi dan kondisi politik Jakarta pada masa kemerdekaan, Soekarno baru bisa menjadi pemimpin yang seutuhnya ketika masa Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959-1965.

Kebijakan-kebijakan yang banyak berkenaan dengan masalah kehidupan rakyat Ibukota akhirnya tercetus oleh Soemarno Sosroatmodjo, Soemarno merupakan seorang gubernur pertama yang memimpin Kota Jakarta dan berlatar belakang sebagai seorang dokter tentara. Soemarno merupakan sosok militer pertama yang menjadi gubernur. Adapun, Pengangkatan Gubernur DKI waktu itu dilakukan langsung oleh Presiden Soekarno.

Berbagai dinamika tatanan Kota Jakarta dihadapi Soemarno pada masa awal kepemimpinnya. Sebut saja ketika tahun 1961, ketika status Djakarta diubah dari Daerah Tingkat Satu menjadi Daerah Khusus Ibukota (DKI, sekarang dieja Daerah Khusus Ibukota/DKI) dan gubernurnya tetap dijabat oleh Soemarno. Bahkan pada tahun 1965 tepatnya pada bulan Agustus, Soekarno mempercayakan Soemarno untuk menduduki 2 jabatan sekaligus yakni Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jakarta. Hal ini bukan tanpa alasan, Soekarno

mempercayakan dua jabatan tersebut kepada sosok Soemarno karena latar belakang karir sebagai dokternya yang cemerlang dan jasanya dalam pembentukan KOWAD (Prajurit Korps Wanita TNI Angkatan Darat).

Memiliki latar belakang pendidikan sebagai dokter tentara menjadikan Soemarno sebagai sosok yang sangat peduli kepada rakyat dan membuat kebijakannya berlandaskan pola pikir preventif, represif dan kuratif. Kebijakan yang sangat berporos dengan kesejahteraan rakyat adalah pengelolaan sampah, pembuatan pasar, pembangunan rumah minimum serta penanggulangan kebakaran. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan-kebijakan Soemarno tidak hanya berkuat terhadap kecantikan dan tata Kota Jakarta tetapi berfokuskan untuk kebutuhan masyarakat Jakarta. Soemarno juga berpendapat bahwa masalah banjir, kebakaran, sampah dan kesehatan rakyat merupakan soal yang saling kait-mengait dan harus ditanggulangi secara serempak, Selain itu, permasalahan perkampungan adalah permasalahan yang krusial dan harus segera ditindaklanjuti karena kampung yang kotor dan jorok merupakan sumber dari penyakit. (Sosroatmodjo, 1981, p. 381)

Soemarno tidak bekerja sendirian, berbagai macam buah pemikirannya juga terinspirasi dari istrinya yang juga aktif dalam berbagai kegiatan organisasi kemanusiaan seperti Palang Merah dan Yayasan Penderita Anak Cacat. Hal ini semakin menguatkan bahwa kebijakan-kebijakannya sangat berporos kepada kebutuhan rakyat. (Lihat Lampiran 1)

Berangkat dari salah satu ungkapan Soemarno dalam otobiografinya,

yakni “Bantu hindari kecemasan rakyat sehari-hari dengan memberinya kemampuan membantu diri sendiri dan mengatasi masalahnya sendiri.” menjadi landasan peneliti untuk meneliti sosok Soemarno lebih dalam lagi. Ungkapan ini dirasa menarik karena Soemarno dinilai peneliti sebagai sosok pemimpin yang tidak hanya memberdayakan rakyat dengan cara memfasilitasi dan memanjakan rakyat dengan fasilitas-fasilitas dan program pemerintah, tetapi dengan melibatkan rakyat untuk bergotong royong membangun Jakarta.

Peneliti menemukan sedikitnya 2 buku dan 1 penelitian yang terfokus oleh Soemarno Sosroatmodjo, yakni buku *Dari Rimba Raya ke Jakarta Raya* yang merupakan otobiografi yang ditulis sendiri oleh Soemarno yang berisi tentang strategi dan cara-cara Soemarno dalam memimpin Kota Jakarta, Buku *Bukit Kenangan* karya Armistiani Soemarno yang berisi sudut pandang istri Soemarno terhadap kebijakan-kebijakan yang Soemarno buat dan penelitian yang ditulis oleh Christopher Silver yang berjudul *Planning the Megacity: Jakarta in the Twentieth Century* yang berisi tentang dinamika Kota Jakarta secara umum dari tahun ke tahun.

Perbedaan penelitian ini dengan dua buku dan satu penelitian tersebut adalah peneliti memfokuskan bagaimana latar belakang Soemarno berpengaruh dalam menangani permasalahan-permasalahan Ibu Kota, apa saja masalah yang dialami Soemarno ketika ia menjabat menjadi gubernur dan bagaimana cara untuk mengatasi masalah- masalah yang dinilai sulit tersebut sehingga membuat perubahan yang baru bagi Kota Jakarta baik secara sosial maupun bidang

infrastruktural. Soemarno dikatakan berhasil menjadi Gubernur Jakarta karena setelah Henk Ngantung lengser, Soemarno kembali menduduki jabatan orang nomor satu di Ibu Kota bahkan dipercaya menjadi Menteri Dalam Negeri (Lihat Lampiran 2). Selain itu, kebijakannya juga banyak mendapat apresiasi oleh masyarakat Kota Jakarta yang dimuat melalui media koran dan berkembang untuk kemajuan Kota Jakarta hingga saat ini.

### **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, pembatasan masalah dalam penelitian ini didasari oleh pembatasan spasial dan temporal. Peneliti menetapkan Jakarta sebagai pembatasan spasial dikarenakan Soemarno ditetapkan sebagai Gubernur Ibu Kota Jakarta dan permasalahan terfokus pada masalah yang Jakarta alami, sedangkan pembatasan temporal peneliti awali sebelum tahun 1960 yang didominasi permasalahan yang dialami oleh Kota Jakarta lalu diakhiri 1965, tahun ini menandai berakhirnya Soemarno sebagai Gubernur dua periode. Pokok permasalahan tersebut memunculkan berbagai macam permasalahan dan pertanyaan yang peneliti rumuskan dan fokuskan pada dua pertanyaan mendasar, yaitu:

1. Bagaimana permasalahan-permasalahan yang Soemarno hadapi selama menjadi Gubernur DKI Jakarta?
2. Bagaimana strategi Soemarno lakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut?



### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana permasalahan-permasalahan yang Soemarno hadapi selama menjadi Gubernur DKI Jakarta
- b. Untuk mengetahui strategi yang Soemarno lakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut

Adapun kegunaan penelitian adalah:

- a. Kegunaan penelitian diharapkan memiliki kegunaan akademis serta kegunaan non-akademis. Kegunaan penelitian secara akademis berguna bagi mahasiswa atau peneliti sebagai edukasi tentang bagaimana strategi Soemarno untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan di Jakarta dan dinamika Kota Jakarta dibawah kepemimpinannya. Peneliti juga berharap penelitian ini bisa menjadi inspirasi bagi pemangku kebijakan dalam mengatasi banjir dan pelaksanaan pembangunan di Jakarta.
- b. Kegunaan non-akademis penelitian ini adalah sebagai informasi dengan tujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan.

### **D. Metode dan Bahan Sumber Penelitian**

#### **a. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

historis dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu cara – cara penelitian dan penelitian sejarah. Langkah – langkah dalam pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik, interpretasi dan penyajian dalam bentuk tulisan. (Kuntowijoyo, 2013, p. 64)

Di dalam pemilihan topik peneliti menggunakan pendekatan emosional karena peneliti memiliki ketertarikan yang kuat untuk meneliti Kota Jakarta. Peneliti menilai, masalah banjir dan sampah merupakan masalah yang masih Jakarta hadapi hingga sekarang dan penganggulangnya selalu bersifat temporal karena mengikuti pemangku kebijakan. Peneliti tertarik dengan andil Soemarno karena kebijakan yang Soemarno terapkan pada eranya dinilai berhasil. Di samping itu, peneliti berencana melanjutkan studi magister Perencanaan Kota sehingga sub bab dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi penelitian yang kontinu.

Pengumpulan sumber penulis lakukan dengan menggunakan buku-buku, koran lama serta arsip yang berkaitan dengan Jakarta pada Era Orde Lama. Verifikasi peneliti lakukan dengan melakukan wawancara kepada pihak keluarga Soemarno Sosroatmodjo yakni Sidharta Soemarno dan Adri Sidharta selaku anak dan cucu Soemarno. Selanjutnya, Interpretasi atau penafsiran, di dalam penelitian ini, peneliti mengaitkan bagaimana latar belakang Soemarno sebagai dokter tentara mempengaruhi kebijakan-kebijakannya yang ada di Jakarta.

## **b. Sumber Penelitian**

Peneliti mengumpulkan sumber menurut bahannya menggunakan sumber buku Dari Rimba Raya ke Jakarta Raya yang merupakan Otobiografi dari Soemarno serta dua buku pendukung yakni Jakarta : Sejarah 400 Tahun karya Susan Blackburn serta buku yang ditulis oleh Firman Lubis yaitu Jakarta 1950-1970. 2 buku yang peneliti gunakan dirasa lebih bisa menggambarkan keadaan Jakarta dari sudut pandang masyarakat biasa, bukan pemerintah. Selain itu, penulis juga menemukan koran lama yang berkaitan dengan penelitian ini yakni Merdeka, Sin Po dan Harian Jaya.

## **E. Sistematika Penelitian**

Dalam tahap penelitian sejarah ini, peneliti menggunakan sistematika penelitiandengan empat bab, yaitu:

Bab I mengemukakan dasar-dasar permasalahan yang Kota Jakarta alami selepas kemerdekaan, khususnya masalah sampah, banjir, kebakaran dan tempat tinggal. Peneliti juga mengemukakan sedikit profil Soemarno untuk menjelaskan krusialitas penelitian.

Bab II menjelaskan kondisi Kota Jakarta secara terperinci apa saja yang menyebabkan Jakarta sering dilanda banjir, sampah serta peran dan kontribusi pemerintah daerah sebelumnya dalam menanggulangi permasalahan Kota Jakarta.

Bab III berisi tentang kiprah Soemarno Sosroatmodjo sebagai Gubernur Jakarta, peneliti banyak mengaitkan dengan latar belakang Soemarno sebagai dokter tentara sehingga kebijakannya dipengaruhi pola pikir Soemarno sehingga menciptakan kebijakan yang banyak berpusat kepada kepentingan umum masyarakat Jakarta.

Bab IV berisi tentang kesimpulan berisi kesimpulan peneliti mengapa Soemarno dinyatakan berhasil dalam masa kepemimpinannya.

